



## Implementasi Program Dinas PRKPP Kota Surabaya Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan

Hanifatul Fitriya Fauzia<sup>1</sup>, Zaraby Firdaus<sup>2</sup>, Indah Prabawati<sup>3</sup>, Wilda Sumarsyah<sup>4</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [25040674055@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674055@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [25040674064@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674064@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>, [indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [wildasumarsyah@unesa.ac.id](mailto:wildasumarsyah@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Juni 2026

### ABSTRACT

Poverty remains a major obstacle to development and public welfare in Indonesia. One of the government's efforts to address this issue is through a policy of providing decent housing for low-income communities as part of achieving Sustainable Development Goals (SDGs) Number 1, namely No Poverty. This study aims to analyze the implementation of the work program of the Surabaya City Public Housing, Settlement Areas and Land Agency (DPRKPP) in supporting poverty alleviation by increasing access to decent housing for low-income communities, and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative method with a descriptive approach supported by Digital Research Methods through data collection from performance reports and relevant public information sources. The research analysis uses the Van Meter and Van Horn policy implementation theory that emphasizes six main variables. The results of the study indicate that programs such as the Rehabilitation of Uninhabitable Houses (Rutilahu) and the management of Simple Rental Flats (Rusunawa) have an important role in improving the quality of housing for the poor. However, various obstacles remain in their implementation, such as limited aid quotas, administrative obstacles, and lack of outreach to the community. Therefore, strengthening coordination, increasing access to information, and optimizing resources are necessary to ensure policies are implemented more effectively in supporting poverty alleviation and achieving the SDGs.

**Keywords:** Poverty, Policy Implementation, Decent Housing, Rusunawa.

### ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kebijakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1, yaitu Tanpa Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh Digital Research Methods melalui penelusuran data dari laporan kinerja dan sumber informasi publik yang relevan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama. Hasil penelitian

---

menunjukkan bahwa program seperti Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterbatasan kuota bantuan, hambatan administratif, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan akses informasi, serta optimalisasi sumber daya agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pencapaian SDGs.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Hunian Layak, Rusunawa.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi biang dari segala permasalahan sosial dan penghambat bagi suatu negara untuk bisa maju dan menyejahterakan rakyatnya, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya soal faktor pendapatan, melainkan juga mencakup tentang keterbatasan akses tentang kebutuhan dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta tempat tinggal suatu keluarga yang layak huni. Dari fenomena tersebut, usaha untuk mengurangi angka kemiskinan membutuhkan pendekatan yang luas dan berkelanjutan melalui kebijakan publik suatu dinas yang tepat sasaran, serta harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menjadikan topik ini sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan dalam program ini, salah satu tujuan utamanya adalah SDGs nomor 1, yaitu Tanpa Kemiskinan. Upaya pencapaian tujuan ini menekankan pada pentingnya pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari anggota perserikatan bangsa-bangsa juga berkomitmen untuk mendukung tercapainya 17 tujuan yang tercantum dalam program SDGs. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lingkup daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu mengimplementasikan berbagai program yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu aspek dalam upaya mengangkat kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian yang layak dan lingkungan pemukiman yang bebas dari situasi kumuh.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang mengacu pada pengurangan angka kemiskinan. Dalam konteks ini, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Surabaya (DPRKPP) memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan terkait penyediaan rumah yang layak, penataan kawasan pemukiman, serta pengelolaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Surabaya untuk mengurangi angka kemiskinan beberapa diantaranya adalah Program Dandan Omah/Rutilahu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni), dan Pengelolaan Rumah Susun/Rusunawa. Kedua program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan.

Program ini dilakukan melalui perbaikan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian sehingga masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak. Selain itu, pemerintah kota juga menyediakan hunian vertikal melalui pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebagai alternatif tempat tinggal masyarakat yang belum mampu memiliki rumah secara ribadi.

Namun faktanya terdapat beberapa kesenjangan antara harapan kebijakan dengan realitas di lapangan. Tidak semua masyarakat yang berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap program bantuan yang diberikan akibat keterbatasan kuota, kendala administratif, kurangnya sosialisasi, maupun faktor birokrasi. Ini merupakan masalah publik karena memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, kondisi kesehatan lingkungan, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi program kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian SDGs Nomor I (Tanpa Kemiskinan). (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan DPRKPP Kota Surabaya dalam mendukung pengentasan kemiskinan, mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Nomor I.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan tujuan kebijakan menjadi tolak ukur apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dan dapat terimplementasikan atau tidak. Kebijakan yang memiliki tujuan jelas akan lebih mudah dinilai apakah benar-benar berhasil atau tidak. Sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. Jika terjadi hambatan maka program tidak akan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi antarorganisasi berkaitan dengan koordinasi antara instansi pelaksana agar program berjalan dengan seimbang dan

tepat sasaran. Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan bagaimana sistem kerja dan aturan di dalam instansi tersebut. Jika mekanismenya terlalu rumit, masyarakat akan kesulitan dalam mengakses bantuan. Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kejujuran aparat dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat juga menjadi faktor dari luar yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, penelitian ini dapat menganalisis secara luas bagaimana implementasi program DPRKPP Kota Surabaya berjalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

## METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta didukung oleh *Digital Research Methods* untuk memperoleh data secara mendalam mengenai kinerja pemerintahan terkait. Penelitian ini difokuskan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya sebagai sasaran penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan data melalui proses penelusuran digital yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran informasi digital berupa laporan kinerja, dan sumber informasi publik yang berkaitan dengan program kerja di lapangan. Analisis data dilakukan secara diskusi sesama peneliti melalui tahapan pengelompokan data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan, dan dimaknai untuk memperoleh gambaran yang tertata mengenai implementasi program kerja dan kebijakan DPRKPP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung penulis mendapatkan data-data yang relevan, dikelompokkan dan disajikan melalui penjelasan naratif. Dipaparkan dalam subbab sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu Implementasi Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan, maka dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

### *Implementasi Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Dalam Mendukung Pencapaian Sdgs Nomor 1 (Tanpa Kemiskinan)*

Dari hasil pendalaman materi, pencarian informasi melalui internet tentang program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan menarik kesimpulan bahwa ada dua program unggulan dari dinas terkait. Pertama

---

terdapat program Dandan Omah, jika diartikan secara umum yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam wilayah Kota Surabaya. Program ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2022, tujuan utamanya untuk membantu masyarakat Kota Surabaya yang berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak huni bagi mereka. Menurut informasi terkait dari tahun 2022 sampai tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan telah berhasil membantu memperbaiki 2.000 unit rumah warga Kota Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa dinas terkait sudah membantu untuk mencapai SDGs 1 tanpa kemiskinan. Dalam perwujudan program ini, dinas terkait berkoordinasi dengan kelurahan, RT/RW, serta melibatkan warga setempat.

Dengan hasil program yang mengatakan ada 2.000 unit rumah yang berhasil di renovasi menunjukkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan sudah cukup efisien dalam membantu masyarakat Kota Surabaya untuk mendapatkan rumah layak huni. Informasi ini juga diperkuat melalui analisis model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program dilihat dari enam unsur yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa unsur yang menjadikan program Dandan Omah ini berhasil meliputi sisi sumber daya yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam tahap renovasi setiap rumah yang ingin diperbaiki. Unsur selanjutnya yaitu dari segi disposisi atau sikap pelaksana di mana dalam penerapannya warga ikut bekerja langsung secara gotong royong dalam proses pembangunan rumah, mulai dari pembongkaran bagian rumah lama, hingga membantu pembangunan fisik. Jadi warga tidak hanya menyumbangkan ide atau dukungan tetapi juga ikut serta dalam membantu proses pengerjaan.

Beberapa diantaranya juga tentang unsur standar dan tujuan kebijakan, program ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membenahi dan memberikan kelayakan hidup pada warga Surabaya. Data yang peneliti dapatkan menunjukkan perubahan yang signifikan pada tampak fisik rumah yang telah direnovasi, dari yang awalnya dinding retak atau yang terbuat dari anyaman bambu sudah diperbaiki dan diganti dengan yang lebih layak huni, atap rumah yang bocor juga tidak lepas dari segi penyempurnaan kelayakan rumah.

Program kedua yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya adalah Pengelolaan Rumah Susun/Rusunawa, yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kota Surabaya. Program ini diinformasikan melalui sosialisasi kepada kelurahan, kecamatan setempat, dan terkadang juga melalui media masa atau penyebaran informasi melalui kanal pribadi DPRKPP Kota Surabaya. Lebih dari 10 unit Rusunawa tersebar di berbagai daerah Kota Surabaya dengan harga sewa yang cukup murah, karena sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah dan pastinya bisa dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Tujuan utamanya sederhana, yaitu untuk memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta merelokasi warga kumuh guna menyusun tata kota yang lebih baik.

Program ini hadir sebagai respons atas semakin terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah perkotaan, terutama di Kota Surabaya, yang menyebabkan harga tanah dan rumah tapak menjadi sulit dijangkau oleh kelompok masyarakat golongan bawah. Melalui program ini, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan lahan secara lebih efisien serta dapat mengurangi kepadatan penduduk yang tidak teratur dan lingkungan kumuh seperti pemukiman di samping rel kereta api. Oleh karena itu, keberadaan Rusunawa menjadi bagian penting dari strategi pengurangan kemiskinan yang tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### ***Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Surabaya***

Pelaksanaan program kerja DPRKPP Kota Surabaya untuk mendukung pencapaian SDGs Nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) merupakan wujud dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Program Dandan Omah dan Rusunawa sebagai strategi dalam kebijakan publik berfokus pada penyediaan tempat tinggal yang layak, tidak hanya memengaruhi aspek fisik hunian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pelaksanaan program harus dievaluasi tidak hanya dari hasil output yang dicapai, tetapi juga dari proses pelaksanaan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPRKPP sebagai pelaksana utama, pemerintah kelurahan, RT/RW, hingga warga yang menjadi penerima manfaat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik bersifat kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik dan efisien agar tujuan program dapat tercapai tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, program Dandan Omah dan Rusunawa secara keseluruhan telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan kualitas hunian masyarakat serta partisipasi aktif warga dalam program tersebut. Namun demikian, pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dari program. Jelasnya peneliti tidak akan hanya memaparkan kekurangan, tetapi juga kelebihan dari setiap program dan dibahas secara berkala.

Faktor pertama yang mendukung suksesnya pelaksanaan program adalah terjalannya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pelaksana kebijakan. Komunikasi yang dilakukan antara DPRKPP, pemerintah kelurahan, serta perangkat RT/RW berlangsung secara intensif melalui kegiatan penyuluhan, pengiriman informasi secara langsung, serta kerjasama di lapangan. Kejelasan dalam interaksi ini memungkinkan semua pihak yang terlibat memahami dengan baik tujuan, cara kerja, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi yang baik juga berperan dalam mengurangi kesalahpahaman serta mempercepat proses implementasi di lapangan.

Faktor pendorong keberhasilan selanjutnya adalah adanya partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR). Melalui KTPR, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai

pelaksana teknis dalam proses renovasi rumah. Keterlibatan ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Peran KTPR tidak bersifat simbolis, melainkan terlibat dalam berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, seperti penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, hingga tahap pelaksanaan pembangunan di lapangan. Selain itu, KTPR juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan rumah agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Di dalam implementasinya, KTPR turut merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program saja, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong warga setempat.

Faktor pendorong terakhir adalah dengan adanya dukungan pemerintah dan kondisi lingkungan yang kondusif. Dalam implementasi Program Dandan Omah dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melanjutkan program secara berkelanjutan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 1.500 unit rumah tidak layak huni dengan dukungan anggaran APBD sebesar Rp68,7 miliar, yang diprioritaskan bagi keluarga miskin sebagai penerima manfaat utama. Adapun capaian program pada tahun sebelumnya juga menunjukkan hasil yang cukup progresif, di mana hingga pertengahan tahun 2023 realisasi perbaikan rumah telah mencapai sekitar 1.200 unit atau hampir setengah dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa program tidak hanya direncanakan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Pembahasan selanjutnya mengenai hambatan di setiap program DPRKPP, hambatan pertama yang peneliti temukan ada pada sumber daya anggaran. Keterbatasan ini menyebabkan tidak semua rumah tidak layak huni dapat segera ditangani, sehingga pelaksanaan program harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya jangkauan program serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal implementasi kebijakan, ketersediaan anggaran merupakan faktor penting yang memengaruhi seberapa efektif program dapat dijalankan.

Hambatan kedua adalah tentang proses birokrasi yang relatif lambat. Hal ini terlihat pada tahapan administrasi, seperti verifikasi data calon penerima manfaat, verifikasi kondisi rumah yang tidak layak huni, hingga proses penentuan keputusan penerima bantuan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa perangkat daerah, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi ini terjadi karena adanya mekanisme birokrasi yang dirancang untuk memastikan prinsip kehati-hatian, akurasi data, serta ketepatan sasaran program. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria agar tidak terjadi kesalahan sasaran (*mis-*

*targeting*). Namun kenyataannya, prosedur yang rumit dan berlapis ini sering kali berdampak pada lambatnya pelaksanaan program yang ada di lapangan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh efisiensi struktur birokrasi yang melaksanakannya.

Hambatan terakhir adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan program. Masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang program-program ini hanya sebagai bantuan untuk memperbaiki rumah secara fisik, tanpa memahami bahwa program ini juga memiliki tujuan jangka panjang terkait keberlanjutan hunian yang layak. Pandangan yang masih terbatas ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program belum sepenuhnya utuh, karena lebih berfokus pada hasil langsung berupa rumah yang sudah diperbaiki, bukan pada pentingnya menjaga kondisi rumah tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya kesadaran sebagian penerima manfaat dalam melakukan pemeliharaan rumah setelah proses renovasi selesai. Beberapa di antaranya belum secara rutin melakukan perawatan berkala, kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, serta belum sepenuhnya menjaga kualitas bangunan yang telah diperbaiki. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam aspek keberlanjutan program masih terbatas. Rendahnya kesadaran ini berpotensi mengurangi efektivitas program dalam jangka panjang, karena rumah yang telah direnovasi dapat kembali mengalami penurunan kualitas apabila tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam menjaga dan mempertahankan hasil program.

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) di Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 1 Tanpa Kemiskinan telah berjalan cukup baik melalui program Dandan Omah/Rutilahu dan pengelolaan Rusunawa. Kedua program ini terbukti memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, serta menyediakan alternatif tempat tinggal yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu di wilayah kota Surabaya. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih mengalami beberapa hambatan, seperti anggaran yang terbatas, proses birokrasi yang cukup panjang, serta rendahnya kesadaran sebagian warga mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan hasil program. Di sisi lain, keberhasilan program juga didorong oleh komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antar pihak pelaksana, partisipasi aktif masyarakat melalui KTPR, serta komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan program secara berkelanjutan.

Adapun saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program DPRKPP di Kota

Surabaya dalam mendukung pencapaian SDGs Nomor 1 Tanpa Kemiskinan. Saran ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan selama proses penelitian. (1) **Penguatan koordinasi dan sosialisasi program**, DPRKPP Kota Surabaya perlu memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan, cara kerja, dan manfaat program, sehingga implementasi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan lebih terarah. (2) **Optimalisasi anggaran dan penyederhanaan prosedur**, Pemerintah perlu mengoptimalkan alokasi anggaran serta melakukan penyederhanaan prosedur administratif. Langkah ini penting untuk memperluas jangkauan program kepada lebih banyak masyarakat serta mempercepat proses penyaluran bantuan tanpa mengurangi ketepatan sasaran. (3) **Peningkatan pendampingan dan kesadaran masyarakat**, Diperlukan pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat penerima manfaat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemeliharaan dan perawatan hasil program. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, keberlangsungan program dapat terjamin dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arnanda, Ghea. & Widiyarta, Agus. (2025). Implementation of the Dandan Omah Program in Realizing Livable Homes in Kedung Cowek Urban Village Surabaya City. Indonesian Association for Public Administration (IAPA), 16(2), 135-141.
- Febry Permata Putri, Grace. & dkk. (2025). Model Perencanaan Interaktif Penataan Ruang Kota Bebas Daerah Kumuh Di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 28-45.
- Forwanti, Eva. & Setiawan, Ferry. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosialkota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 8(2), 88-101.
- Hakim, Abdul. (2023). Program Dandan Omah Surabaya sudah mencakup 1.200 rumah tak layak huni. Antara Jatim. Diakses pada 21 April 2026 <https://jatim.antaranews.com/berita/726600/program-dandan-omah-surabaya-sudah-mencakup-1200-rumah-tak-layak-huni>
- Novita Sari, Sherly. & dkk. (2025). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JRP: Jurnal Relasi Publik, 3(3), 96-107.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). Program Dandan Omah Dikerjakan Warga Sekitar, Wali Kota Eri Cahyadi: RT/RW dan LPMK Petakan Warga Miskin. Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya. Diakses pada 23 April 2026 <https://www.surabaya.go.id/id/berita/11123/program-dandan-omah-dikerjakan-warga-sekitar-wali-kota-eri-cahyadi-rtrw-dan-lpmk-petakan-warga-miskin>

- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). Prioritaskan Keluarga Miskin, Program Rutilahu 2024 Siap Bedah 1.500 Rumah. Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya. Diakses pada 16 April 2026 <https://www.surabaya.go.id/id/berita/9824/prioritaskan-keluarga-miskin-program-rutilahu-2024-siap-bedah-1500-rumah>
- Setiyoningrum, Adinda. & Saleh, Moh. (2023). Keberadaan Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) di Kota Surabaya Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Hukum*, 20(2), 426-438.
- Setiyoningrum, Adinda. & Saleh, Moh. (2024). Permasalahan dan solusi kebijakan dalam pemanfaatan rumah susun sewa (Rusunawa) yang efektif dan efisien di Kota Surabaya. *Notaire*, 7(1), 1-22.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- Wulandari Purwaningdyah, Niken. & dkk. (2018). Analisis kualitas pelayanan rusunawa gunung sari surabaya. *Journal of Civil Engineering*, 33(2), 75-85.
- Zamrisyaf Aldiansyah, Sulthan. & Farid Ma'ruf, Muhammad. (2024). Analisis Peran Aktor Dalam Kolaborasi Penyediaan Permukiman Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Program Dandan Omah). *Publika*, 12(4), 957-968.